EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGDUNGAN ANAK DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

Devi Widiawati¹, Ahmad Juliarso², Ari Kusumah Wardani³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3} E-mail : deviwidiawati01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya program Kampung Keluarga Berencana Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman dan pengalaman dari para koordinator PPKBD tingkat desa maupun di tingkat dusun terkait dengan proses perencanaan suatu program, masih adanya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan program Kampung KB yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Keluarga Berencana oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan optimal karena masih kurangnya pemahaman terkait dengan program Kampung KB yang akan dilaksanakan dan masih adanya perbedaan pemahaman terhadap program Kampung KB.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Keluarga Berencana

PENDAHULUAN

Dalam Program Keluarga Berencana dan Pembangunan, keluarga adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Hal ini berfungsi sebagai penyediaan perencanaan kependudukan yang sangat strategis, menyeluruh dan mendasar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, sehat dan sejahtera.

Di dalam buku Pedoman Kampung KB (2017:3) menyatakan bahwa Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menghimpun dari Program pembangunan keluarga dengan empat bidang kerja utama, yaitu di antaranya, pendewasaan pengaturan usia perkawinan, kelahiran anak, penguatan ketahanan keluarga dan pengaruh dari ekonomi keluarga, serta penertiban pengawasan, dan pertumbuhan penduduk merupakan bagian pengentasan kemiskinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berkeyakinan bahwa keberhasilan dari pelaksanaan pertumbuhan penduduk yang seimbang dalam pembangunan kualitas hidup penduduk dan keluarga dapat ditingkatkan dalam segala hal dari segi pembangunan atau peningkatan masyarakat yang lebih baik, lebih maju, mandiri dan hidup berdampingan dalam melakukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Keluarga Berencana dan Sistem Infromasi Keluarga mengarahkan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kampung KB merupakan pelaksanaan inovasi strategis dalam melaksanakan prioritas kegiatan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK) secara menyeluruh di lini luar. Kampung KB juga merupakan miniatur pelaksanaan dalam salah satu bentuk **KKBPK** program yang mencangkup seluruh wilayah dan sinergi **BKKBN** yang melibatkan kementrian lembaga, atau mitra, kelompok kepentingan lembaga terkait sesuai kebutuhan kondisi daerah.

Menurut Jabar (2009: 5): "Evaluasi program adalah proses pengumpulan data tau informasi ilmiah, yang hasilnya dapat digunakan dalam pertimbangan para pengambil keputusan tentang alternatif-alternatif dalam setiap kebijakan".

Sedangkan menurut Mudjiono (2006: 19) menyatakan : "Sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu".

Dengan begitu, kampung KB dan juga evaluasi sangat diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan sebagai salah satu model dalam pelaksanaan program **KB** Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu program strategis yang tujuanya untuk mempercepat pembangunan khususnya yang berada di daerah pinggiran.

Salah satu Kampung Keluarga

Berencana (KB) berada di Kabupaten Pangandaran yang berlokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Desa Sukamaju dipilih menjadi salah satu tempat pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) ditandai keluarnya SK Kecamatan dengan Mangunjaya Nomor 476/KPTS/KEC/2017 pada tanggal 10 Maret 2017 yang bersumber dari edaran bupati Pangandaran tentang penetapan pembentukan kampung KB Dusun Sukaraja Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabuapaten Pangandaran. Ha tersebut dikarenakan di desa tersebut masih kurang kesadaran masyarakatnya dalam hal pentingnya Kampung KB. Masih ada masyarakat kurang kesadaranya untuk vang memiliki anak lebih dari dua. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak reproduksi pada pasangan dan remaja di usia subur. Melalui program kampung KB yang dekat dengan masyarakat dan hadir di tengah masyarakat. Sehingga bisa diharapkan masyarakat semakin mudah untuk bisa mengakses KB. Terjadinya pertumbuhan penduduk yang cepat dikarenakan salah satunya oleh banyaknya pasangan yang menikah dan melahirkan muda. Dengan berkembangnya kampung KB di Desa Sukamaju, berbagai program telah behasil dikembangkan, seperti contohnya masyarakat gotong royong (margot), apotek hidup, pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman produktif, dan program Bank Sampah

anorganik maupun organik.

Pada kenyataanya masih ada permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan program Kampung KB ini yang awalnya diharapkan mampu membantu informasi tentang KB, namun yang terjadi pada pelaksanaan di lapangan belum optimal. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- 1. Kurangnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas kesehatan untuk membantu terealisasikanya Program Kampung KB di Desa Sukamaju sehingga peran aktif dari masyarakat dalam mengikuti Program Kampung KB masih tergolong rendah. Contohnya: Unit Pelaksana Teknis Dinas kurang bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan sosialiasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Program Kampung KB.
- 2. Kurangnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai melakukan dalam Program KB, sehingga Kampung dalam pelaksanaan program kampung KB belum terealisasikan dengan baik. Selama ini pemerintah desa hanya dari mengandalkan APBD. Contohnya: Masih kurangnya anggaran yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas terlalu kecil atau sedikit.
- 3. Masih kurang terencananya dari pihak UPTD dalam merencanakan evaluasi yang sistematis dan

terjadwal secara sistematis sebagai upaya perbaikan kinerja maupun evaluasi pegawai. Contohnya: Pelaksanaan evaluasi masih kondisional dan belum terjadwal.

Sejalan dengan indikatorindikator masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana evaluasi program kampung keluarga berencana di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten pangandaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yaknireduksi data, penyajian data sampai Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Menurut Sugiyono (2018;213) metodepenelitian kualitatif adalah:

"Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagaiinstrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok."

Melihat uraian tersebut, maka

penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami dan menafsirkan makna suatu masalah yang teriadi secara mendalam. penelitian ini, penulis menggambarkan mengenai permasalahan pada Evaluasi Kampung Keluarga Berencana Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana. Perempuan Pemberdayaan Perlindungan Anak di Desa Sukamaju Kecamatan Mangnunjaya Kabupaten Ciamis.

Adapun informan dari penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang yaitu Petugas UPTD, Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) tingkat desa, tiga orang Pembantu Perwakilan Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) tingkat dusun, dan lima orang masyarakat pengguna KB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Konteks**

Evaluasi konteks menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu mengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu lebih kelompok luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKP3A bekerja sama dengan desa dalam membantu menetapkan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi program Kampung KB Berdasarkan hasil penelitian

bahwa selama ini Kurangnya kerjasama antara pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A dengan desa, dikarenakan Petugas UPTD kurang melakukan kunjungan langsung ke desa binaan dan kerjasama dalam merumuskan penetapan hasil dari evaluasi pelaksanaan program Kampung KB diharapkan dapat segera ditindak lanjuti agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti kebutuhan alat KB serta kebutuhan benih untuk penanaman apotek hidup.

Selanjutnya menurut Thoha (2003:1) mengatakan bahwa:

"evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan."

Dengan adanya program kegiatan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A pemberian sosialiasi telah dilakukan namun belum optimal karena belum sejalan dengan teori dari dari Thoha (2003:1)tentang evaluasi bahwasannya dalam evaluasi harus terencana serta menggunakan instrument agar menjadi tolak ukur.

Adapaun hambatan-hambatan nya yakni Koordinator PPKBD tingkat desa maupun di tingkat dusun kurang menguasai proses pemahaman tentang program Kampung KB. Serta upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas KB terkait sosialisasi tentang manfaat program pelaksanaan Kampung KB yaitu, Koordinator

PPKBD tingkat desa maupun di tingkat dusun untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi masyarakat guna untuk meningkatkan pemahamanya sehingga dapat turut serta dalam melakukan perencanaan keputusan untuk pelaksanaan program Kampung KB.

b. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas KB terkait adanya manfaat program pelaksana Kampung KB.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini adanya usaha bekerjasama dengan Petugas UPTD sebagai pelaksana dilapangan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan program Kampung KB yang akan dikembangkan, namun terkadang Petugas UPTD kurang aktif untuk memberikan saran dan masukan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selanjutnya pengertian sosialisasi menurut Dwi Narwako, dan Bagong Suyanto (2007:74) mengatakan bahwa:

> "Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna di mana setiap individu berupaya menyelaraskan hidupnya tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi, seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan tempat dia bersosialisasi. Lewat proses sosialisasi, individu

individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus dilakukan, dan tingkah laku pekerti apakah yang harus tidak dilakukan"

Dengan demikian melihat daripada teori dari Dwi Narwako, dan Bagong Suyanto (2007:74) maka program kegiatan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A pemberian sosialiasi telah dilakukan namun belum optimal karena belum sejalan dengan teori tersebut.

Adapun hambatan- hambatan vaitu Koordinator PPKBD yang tingkat desa maupun di tingkat dusun kurang menguasai proses pemahaman program Kampung tentang Adapun upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas KB terkait sosialisasi tentang manfaat program pelaksanaan Kampung KB yaitu, Koordinator PPKBD tingkat desa maupun di tingkat dusun untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi masyarakat guna untuk meningkatkan pemahamanya sehingga dapat turut serta dalam melakukan perencanaan keputusan untuk pelaksanaan program Kampung KB.

2. Input

Evaluasi input menentukan alternatif pendekatan, pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya afektif penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Pengambil keputusan dalam evaluasi input di dalamnya memilih penyusunan rencana, penulisan sumberdaya, proposal, alokasi

pengelolaan ketenagaan, jadwal kegiatan, dan tersusun rapi dalam membantu mengambil keputusan berusaha menyiapkan rencana dan pembiayaan.

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A membantu memberikan anggaran dalam program pelaksanaan Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian diketahui peran aktif dari Petugas UPTD untuk melakukan kerjasama terhadap para koordinator agar dapat bersama-sama merencanakan dan menetapkan strategi untuk mencapai kebutuhan dalam program Kampung KB. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika disandingkan dengan

Selanjutnya Hansen dan Mowen (1999) menjelaskan tentang anggaran:

"Anggaran berperan penting dalam rangka sarana untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan atas perencanaan dan pengendalian manajemen."

Sehingga mekanisme Evaluasi Program Kampung KB terkait Input tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A membantu memberikan anggaran dalam program pelaksanaan kampung KB belum optimal karena belum selaras dengan teori diata, dapat dibuktikan dengan penggunaan anggaran anggaran yang diberikan oleh dinas terlalu kecil atau sedikit padahal anggaran sangat berpengaruh dalam rangka sarana untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun hambatan masih kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan anggaran yang dikembangkan di pemukiman masyarakat di sekitar desa sehingga belum mampu menentukan alternatif kegiatan yang akan diambil dalam program Kampung KB. Sehingga dalam upaya yang dilakukan dalam pengembangan anggaran program pelaksanaan Kampung KB, sehingga dapat mengetahui penggunaan anggaran yang dimanfaatkan dan dikembangkan di pemukiman masyarakat desa untuk bisa dijadikan alternatif kegiatan yang akan diambil dalam program Kampung KB.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKB3A membantu merencanakan dana menetapkan strategi untuk mencapai kebutuhan dalam Program Kampung KB.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bahwa selama ini perlu adanya perencanaan penetapan strategi yang matang untuk mencapai kebutuhan dalam pelaksanaan program Kampung KB, dan hal ini perlu adanya koordinasi yang baik di antara kedua belah pihak serta adanya peran aktif dari Petugas **UPTD** untuk melakukan pendampingan terhadap para koordinator agar dapat bersama-sama merencanakan dan menetapkan strategi untuk mencapai kebutuhan dalam program Kampung KB, seperti melakukan pertemuan rutin untuk merencanakan dan menetapkan strategi dalam program pemanfaatan lahan dan program bank sampah.

Selanjutnya teori Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah "Perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya."

Evaluasi Program Kampung KB terkait Input mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A membantu merencaranakan dan menetapkan strategi untuk mencapai kebutuhan dalam program Kampung KB belum optimal karena sejalan dengan teori diatas. dapat dibuktikan dengan koordinasi kurangnya dari para koordinator PPKBP tingkat desa maupun di tingkat dusun sehingga belum mampu melakukan perencanaan dan penetapan strategi untuk penetapan strategi untuk mencapai kebutuhan dalam program Kampung KB.

3. Proses Implementasi

Evaluasi proses (process) menilah pelaksanaan rencana untuk membantu staf melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan menafsirkan hasil.

a. Adanya Jadwal Evaluasi Secara Teratur dan Sistematis oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas KB.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa selama

ini masih belum adanya jadwal evaluasi yang teratur dan sistematis sehingga dilaksanakan evaluasi ketika sudah melakukan kegiatan saja dan tidak terlihat adanya jadwal-jadwal evaluasi rutinan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap apa yang akan, sedang dan telah dilaksanakan serta evaluasi dari kinerja para pegawai atau petugas setempat.

Adapun hambatan dari pada evaluasi strategi program kerja yakni belum adanya jadwal evaluasi yang tetap sehingga sedikit kurang efektif dalam dan kurang beraturan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut

Dengan demikian teori menurut William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann (1978) berpendapat bahwa:

> "Evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, serta juga menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif-alternatif keputusan."

Sehingga mekanisme Evaluasi Program Kampung KB terkait pembuatan jadwal evaluasi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A dalam membantu menetapkan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi program Kampung KB belum optimal. Dapat dibuktikan tidak adanya pembuatan jadwal evalusi yang telah ditetapkan.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas
PPKBP3A membantu
mengevaluasi ketercapaian
rencana yang diterapkan
dalam program Kampung KB.
Berdasarkan hasil penelitian dapat

diketahui bahwa selama ini pelaksana evaluasi terhadap kegiatan program Kampung KB yang dilakukan secara rutin dimaksudkan agar dapat mengetahui secara cepat pencapaian dari pelaksanaan program Kampung KB namun namun kurangnya dilakukan pengawasan sehingga kesulitan untuk membantu dalam melakukan evaluasi. seperti pencapaian target beserta KB dan pencapaian kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan sekitar rumah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jika disandingkan dengan teori Thoha (2003:1) tentang evaluasi yakni:

"evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan."

Sehingga mekanisme Evaluasi Program Kampung KB terkait proses impelementasi mengenai Unit Pelaksana Tekis Dinas PPKBP3A membantu mengevaluasi ketercapaian rencana yang ditetapkan dalam program Kampung KB belum optimal dapat belum adanya jadwal evaluasi yang tetap sehingga sedikit kurang efektif dalam dan kurang beraturan dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

- 4. Produk
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A mengevaluasi dampak pelaksanaan program kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama ini sudah dilakukaannya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Kampung KB sehingga dapat mengetahui dampak positif pelaksanaan program tersebut, seperti meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam program KB sehingga pelaksana evaluasi menyeluruh terhadap semua kegiatan sudah terlihat adanya dampak pelaksanaan positif dari program tersebut, hal itu sudah dirasakan oleh semua masyarakat seperti penanaman apotek hidup yang dapat dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari kaum ibu-ibu di sekitar desa.

Dengan demikian sejalan dengan teori Mohammad (2000:5) mengemukakan tentang pengertian evaluasi:

"Dapat disamakan dengan penafsiran pemberian angka dan penilaian. Oleh karena itu hasil evaluasi seringkali dijadikan sebagai umpan balik bagi program sehingga pelaksanaan program dapat meningkatkan efektifitas dan efisien mekanisme"

Evaluasi Program Kampung KB terkait Produk mengena Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A mengevaluasi dampak pelaksana program Kampung KB sudah cukup baik karena sudah sejalan dengan teori Mohammad (2000:5),dapat dibuktikan sudah dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Kampung KB.

b. Unit Pelaksan Teknis Dinas PPKBP3A menetapkan hasil

dari pelaksanaan program Kampung KB

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama ini Petugas UPTD sudah aktif untuk interaksi dengan semua elemen masyarakat di sekitar desa sehingga memudahkan untuk menetapkan hasil dari pelaksanaan program Kampung KB sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika disandingkan dengan teori menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5) bahwa:

"Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah optimal."

Evaluasi Program Kampung KB terkait Produk mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A menetapkan hasil dari pelaksanaan program Kampung KB sudah optimal, dapat dibuktikan para koordinator PPKBD baik di tingkat desa maupun di tingkat dusun sudah mengembangkan dan menetapakan hasil dari pelaksanaan program Kampung KB agar dapat dijadikan ciri khas kedaerahan.

Adapun hambatan yang ditemukan pada indikator Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKP3A dalam mengevaluasi dampak pelaksanaan program Kampung KB sehingga kurangnya peran aktif dari para koordinator dalam mengajak untuk melakukan pengevaluasian secara rutin. Sehingga upaya yang sedang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A aktif berperan untuk mengajak semua para koordinator

PPKBD tingkat desa maupun di tingkat dusun serta dari masyarakat desa sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi program kampung Keluargaberencana oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan MangunjayaKabupaten Pangandaran di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi program Kampung Keluarga Berencana oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum optimal dengan kurang memperhatikan empat aspek pelaksanaan evaluasi menurut Stufflebeam dalam (Tayibnapis, 2008:5) yang terdiri dari konteks, input, implementasi dan produk, terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas KB terkait adanya manfaat program pelaksanaan Kampung KB,karena kesediaan kurangnya masyarakat untuk menerima arahan dari Petugas UPTD. Hal ini terbukti dari 8 indikator yang diteliti 3 diantaranya sudah terpenuhi, namun 5 indikator lainya belum terpenuhi.

Adapun hambatan-hambatan dalam evaluasi program kampung Keluarga Berencana oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PPKBP3A Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran di Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten seperti Pangandaran, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait tentang manfaat program kampung KB sehingga banyaknya pasangan usia subur yang belum memanfaatkan program KB. lalu kurangnya Unit Pelaksana **Teknis** Dinas dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam melakukan program Kampung KB, lalu Kurangnya Unit Pelaksana **Teknis** Dinas dalam bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas kesehatan dapat dilihat dari rendahnya masyarakat dalam mengikuti Program Kampung KB.

Sehingga upaya — upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada indikator ini yakni dilakukannya berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas tidak hanya terpaku pada satu dusun saja tetapi harus menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta;Graha IImu

Arifin, Zainal, 2010, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, Remaja. Rosdakarya, Bandung.

Arikunto, S. (2002). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

- Dwi Narwako, dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Edisi Kedua, Cet. III., (Jakarta: Prenada)
- Suratun, dkk. 2008. Pelayanan Keluarga Berencana & Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: Trans Info Media
- Sulistyawati, Ari.2013.Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika
- Tayibnapis, 2008. Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi. Rineka Cipta. Jakarta

Media Group, 2007). h. 74

- Maylisa dan Budi, 2013, Evaluasi Keputusan Pemberian Potongan Tarif Sewa Kamar (Studi Kasus Pada Hotel Jentra Dagen Yogyakarta). Yogyakarta.
- Novi Wulandari. 2018. Evaluasi Implementasi Kampung Keluarga Berencana (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) Fakultas IImu Sosial Dan IImu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.
- Riski Hoeriah. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di

87 Peraturan Pemerintah Nomor Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Tahun 2014 tentang Perkembangan Sistem Informasi Keluarga

BKKBN. 2014. Buku saku bagi petugas lapangan program KB Nasional materi konseling, Jakarta. BKKBN.